



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMSUL MUNAWAR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 418576

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.605.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.115.000.000
2. Tanah Seluas 466 m2 di KAB / KOTA MUARA ENIM, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, SUZUKI MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	48.663.053
F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.000.000
Sub Total	Rp.	1.794.663.053
III. HUTANG	Rp.	8.750.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.785.913.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.